



BUPATI BENGKALIS

PROVINSI RIAU PERATURAN BUPATI BENGKALIS NOMOR 80 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BENGKALIS NOMOR 65 TAHUN 2018 TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN SATU PINTU KABUPATEN BENGKALIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti surat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Nomor: S-30/SES.M.EKON/01/2019 tentang perubahan nomenklatur jenis izin pada sistem OSS;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Bengkalis;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5028);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
9. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Satu Pintu Daerah;
11. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Eselonering, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Bengkalis (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 Nomor 53);
12. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Bengkalis (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2018 Nomor 65);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BENGKALIS NOMOR 65 TAHUN 2018 TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN SATU PINTU KABUPATEN BENGKALIS.

Pasal I

Merubah Lampiran Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati Bengkalis Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Bengkalis (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2018 Nomor 65), diubah sebagai berikut:

Lampiran tentang Jenis Perizinan dan Nonperizinan yang didelegasikan, diubah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan perundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 1 November 2019

BUPATI BENGKALIS



AMRIL MUKMININ

Diundangkan di Bengkalis
pada tanggal 4 November 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS



H. BUSTAMY HY

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2019 NOMOR 80

JENIS PERIZINAN DAN NONPERIZINAN YANG DIDELEGASIKAN

No	Perizinan dan Nonperizinan	Jenis Izin	Diterbitkan Melalui	Sektor
1	Izin Lokasi	Izin Usaha	OSS	Pertanahan
2	Izin Mendirikan Rumah Sakit	Izin Usaha	OSS	Kesehatan
3	Sertifikat Produksi Perusahaan Rumah Tangga (PRT) Alat Kesehatan dan PKRT	Izin Komersial / Operasional	OSS	
4	Izin Toko Alat Kesehatan	Izin Komersial / Operasional	OSS	
5	Izin Laboratorium Klinik	Izin Komersial / Operasional	OSS	
6	Izin Toko Optikal	Izin Komersial / Operasional	OSS	
7	Izin Operasional Rumah Sakit	Izin Komersial / Operasional	OSS	
8	Izin Operasional Klinik	Izin Komersial / Operasional	OSS	
9	Surat Izin Praktek Dokter Umum/Spesialis/Dokter Gigi	Izin Usaha	DPMPSP	
10	Izin Apotek	Izin Komersial / Operasional	OSS	
11	Izin Toko Obat	Izin Komersial/Operasional dan Izin Usaha	OSS	
12	Sertifikat Produksi Usaha Kecil dan Mikro Obat Tradisional	Izin Komersial/Operasional dan Izin Usaha	OSS	
13	Surat Izin Kerja Perekam Medis	Izin Komersial / Operasional	DPMPSP	
14	Surat Izin Praktek Bidan	Izin Usaha	DPMPSP	
15	Surat Izin Praktek Apoteker	Izin Usaha	DPMPSP	
16	Surat Izin Kerja/Praktek Perawat	Izin Usaha	DPMPSP	
17	Surat Izin Praktek Penata Anestesi	Izin Usaha	DPMPSP	
18	Surat Izin Kerja/Praktek Fisioterapis	Izin Usaha	DPMPSP	
19	Surat Izin Praktek Refraksionis Optisien dan Optometris	Izin Usaha	DPMPSP	
20	Surat Izin Kerja Radiografer	Izin Usaha	DPMPSP	

21	Surat Izin Praktek Elektromedis	Izin Usaha	DPMPSP	Kesehatan	
22	Surat Izin Praktek Tenaga Sanitarian	Izin Usaha	DPMPSP		
23	Surat Izin Praktek Okupasi Terapis	Izin Usaha	DPMPSP		
24	Surat Izin Praktek Tenaga Gizi	Izin Usaha	DPMPSP		
25	Surat Izin Praktek Ahli Teknologi Laboratorium Medik/Analisis Kesehatan	Izin Usaha	DPMPSP		
26	Surat Terdaftar Penyehat Tradisional	Izin Usaha	DPMPSP		
27	Surat Izin Praktek Terapis Gigi dan Mulut	Izin Usaha	DPMPSP		
28	Surat Izin Praktek Tenaga Teknis Kefarmasian	Izin Usaha	DPMPSP		
29	Surat Izin Praktek Tukang Gigi	Izin Usaha	DPMPSP		
30	Surat Izin Kerja / Praktek Terapi Wicara	Izin Usaha	DPMPSP		
31	Surat Izin Kerja Teknisi Gigi	Izin Usaha	DPMPSP		
32	Sertifikat Laik Sehat Hotel	Izin Usaha	DPMPSP		
33	Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Depot Air Minum Isi Ulang	Izin Usaha	DPMPSP		
34	Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Jasa Boga	Izin Usaha	DPMPSP		
35	Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Rumah Makan dan Restoran	Izin Usaha	DPMPSP		
36	Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan	Izin Usaha	DPMPSP		
37	Izin Penyelenggaraan Pengendalian Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit	Izin Komersial / Operasional	OSS		
38	Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)	Izin Komersial / Operasional	OSS		
39	Izin Unit Transfusi Darah (UTDRS)	Izin Usaha	DPMPSP		
40	Izin Lingkungan	Izin Usaha	OSS dan DPMPSP		Lingkungan Hidup
41	Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (SPPL)	Izin Usaha	OSS dan DPMPSP		
42	Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) Untuk Usaha Jasa	Izin Usaha	OSS dan DPMPSP		

43	Izin Pembuangan Air Limbah	Izin Komersial / Operasional	OSS dan DPMPSP	Lingkungan Hidup
44	Izin Operasional Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) untuk Penghasil	Izin Komersial / Operasional	OSS	
45	Izin Pengelolaan Sampah	Izin Komersial / Operasional	DPMPSP	
46	Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)	Izin Usaha	OSS	Perikanan
47	Tanda Daftar Kapal Perikanan Untuk Nelayan Kecil	Izin Usaha	OSS	
48	Tanda Daftar Bagi Pembudidaya Ikan Kecil	Izin Usaha	OSS	
49	Izin Usaha Industri (IUI)	Izin Usaha	OSS	Perindustrian
50	Izin Perluasan Usaha Industri	Izin Usaha	OSS	
51	Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI)	Izin Usaha	OSS	
52	Izin Perluasan Kawasan Industri	Izin Usaha	OSS	
53	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)	Izin Usaha	OSS	Perdagangan
54	Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW)	Izin Komersial / Operasional	OSS	
55	Tanda Daftar Gudang (TDG)	Izin Komersial / Operasional	OSS	
56	Surat Izin Toko Swalayan/IUTM	Izin Komersial / Operasional	OSS	
57	Surat Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP)	Izin Komersial / Operasional	OSS	
58	Izin Penyelenggaraan Pelabuhan Sungai dan Danau	Izin Usaha	OSS	Perhubungan
59	Izin Pelabuhan Umum	Izin Usaha	OSS	
60	Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat (Angkutan di Perairan)	Izin Usaha	OSS	
61	Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau	Izin Usaha	OSS	
62	Izin Usaha Angkutan Laut	Izin Usaha	OSS	
63	Persetujuan Kerja Keruk dan/atau Reklamasi	Izin Komersial / Operasional	OSS	
64	Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai dan Danau Dalam Kabupaten	Izin Komersial / Operasional	OSS	

65	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas	Izin Komersial / Operasional	OSS	Perhubungan
66	Persetujuan Pengoperasian Kapal Angkutan Penyeberangan	Izin Komersial / Operasional	OSS	
67	Izin Penyelenggaraan Pelabuhan Penyeberangan	Izin Usaha	OSS	
68	Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang	Izin Usaha	OSS	
69	Izin Usaha Jasa Terkait Dengan Angkutan Perairan	Izin Usaha	OSS	
70	Izin Penyelenggaraan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKJ)	Izin Komersial / Operasional	OSS	
71	Tanda Daftar Usaha Pariwisata	Izin Usaha	OSS	Pariwisata
72	Izin Usaha Jasa Konstruksi	Izin Usaha	OSS	Pekerjaan Umum
73	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	Izin Usaha	DPMPSP / SIMBG	
74	Sertifikat Laik Fungsi (SLF)	Izin Usaha	DPMPSP / SIMBG	
75	Surat Izin Peil Banjir	Izin Usaha	OSS	
76	Izin Usaha Perkebunan (IUP)	Izin Usaha	OSS	Pertanian dan Peternakan
77	Izin Usaha Tanaman Pangan	Izin Usaha	OSS	
78	Pendaftaran Usaha Budidaya Holtikultura	Izin Usaha	OSS	
79	Pendaftaran Usaha Tanaman Pangan	Izin Usaha	OSS	
80	Pendaftaran Usaha Perkebunan	Izin Usaha	OSS	
81	Izin Usaha Holtikultura	Izin Usaha	OSS	
82	Izin Usaha Peternakan	Izin Usaha	OSS	
83	Pendaftaran Usaha Peternakan	Izin Usaha	OSS	
84	Izin Usaha Penangkaran Burung Walet	Izin Usaha	DPMPSP	
85	Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan	Izin Usaha	OSS	Pendidikan
86	Izin Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal	Izin Komersial / Operasional	OSS	
87	Izin Riset dan Penelitian	Izin Komersial / Operasional	DPMPSP	
88	Sertifikat HMRS a/n Developer	Izin Komersial / Operasional	OSS	Perumahan

89	Izin Rencana Fungsi dan Pemanfaatan Rumah Susun	Izin Komersial / Operasional	OSS	Perumahan
90	Izin Pengubahan Rencana Fungsi dan Pemanfaatan Rumah Susun	Izin Komersial / Operasional	OSS	
91	Pengesahan Pertelaan	Izin Komersial / Operasional	OSS	
92	Sertifikat HMRS a/n Pembeli	Izin Komersial / Operasional	OSS	
93	Izin Usaha Pembangunan dan Pengusahaan Properti	Izin Usaha	DPMPSP	
94	Izin Usaha Bidang Perumahan	Izin Usaha	DPMPSP	
95	Izin Koperasi Simpan Pinjam	Izin Usaha	OSS	Koperasi dan UKM
96	Izin Pembukaan Kantor Cabang Koperasi Simpan Pinjam	Izin Komersial / Operasional	OSS	
97	Izin Pembukaan Kantor Cabang Pembantu Koperasi Simpan Pinjam	Izin Komersial / Operasional	OSS	
98	Izin Pembukaan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam	Izin Komersial / Operasional	OSS	
99	Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK)	Izin Usaha	OSS	
100	Izin Warung Internet	Izin Usaha	DPMPSP	Komunikasi
101	Izin Pemasangan Spanduk atau Baliho dan Sejenisnya	Izin Usaha	DPMPSP	
102	Izin Lembaga Pelatihan Kerja	Izin Usaha	OSS	Ketenaga kerjaan
103	Izin Usaha Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta	Izin Usaha	OSS	
104	Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing	Izin Usaha	DPMPSP	
105	Izin Pengumpulan Uang dan Barang	Izin Komersial / Operasional	DPMPSP	Sosial
106	Izin Tanda Daftar Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) atau Organisasi Sosial (ORSOS)	Izin Komersial / Operasional	DPMPSP	
107	Penerbitan Izin Penggunaan Arsip Yang Bersifat Tertutup Yang Disimpan di Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten	Izin Komersial / Operasional	OSS	Kearsipan

BUPATI BENGKALIS

AMRIL MUKMININ